

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARAI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

ISMONO, JOKO

Pembimbing : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH. MS.

LAW OF EVIDENCE

KKB KK-2 TH 15 / 11 Ism p

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

Abstrak

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU PPHI. *Ratio legis* dari pengaturan hukum acara yang berlaku khusus tersebut adalah prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta prinsip perlindungan hukum dalam hubungan industrial. Dalam praktek penerapan hukum pembuktian pada perkara perselisihan hubungan industrial, hakim dihadapkan pada permasalahan pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata berpedoman pada Pasal 163 HIR yaitu barang siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan. Pedoman pembagian beban pembuktian yang demikian hanya dapat diterapkan pada peristiwa positif yaitu peristiwa yang menerbitkan atau menimbulkan suatu hak. Pembuktian peristiwa negatif, yaitu peristiwa yang meniadakan atau menghapuskan suatu hak, tidak sepatutnya dibebankan kepada pihak yang mendalilkan. Membuktikan sesuatu yang negatif umumnya tidak mungkin atau *negative non sunt probanda*.. Dalam praktek penerapan hukum pembuktian di Pengadilan Hubungan Industrial, hakim memegang peranan penting dalam membagi beban pembuktian dengan menitikberatkan pada pertimbangan keadilan berdasarkan prinsip *audi et alteram partem*.

Kata Kunci : Hukum Pembuktian, Pengadilan Hubungan Industrial

LAW OF EVIDENCE IN THE INDUSTRIAL RELATIONS COURT LEGAL PROCEEDING

Abstract

An Industrial Relations Court is a special court established within the District Court that has the authority to review, bring to court, and provide a verdict concerning an industrial relations dispute. The prevailing legal proceeding in the Industrial Relations Court is the Civil Law Proceeding prevails at the general court, unless otherwise regulated under the Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement. *Ratio legis* of that otherwise legal proceeding regulating is the principle of simple, fast, and cheap court, also principle of legal protection in industrial relations. The general rule of burden of proof based on Article 163 HIR ; he who assert must prove. That rules implemented only in positive occasion, but not in negative occasion. Negative occasion means occasion release the right. Proving something negative usually impossible or *negative non sunt probanda*. On practically, judges have important role to implementing law of evidence based on Justice.

Key Words : Law of Evidence, Industrial Relations Court